

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang publik bukan sekadar ruang kosong di antara bangunan, melainkan infrastruktur sosial kota tempat warga dapat berkumpul, berinteraksi, bertukar informasi, dan membentuk identitas kolektif (Carr *et al.*, 1992). Sebagai infrastruktur sosial, ruang publik menopang kualitas kehidupan bermasyarakat karena menjadi wahana pertukaran informasi, pembentukan kelompok sosial, serta transmisi nilai-nilai budaya dan memori kolektif yang menjadikan kota bermakna bagi penghuninya.

Di kota-kota kecil dan pesisir, penyediaan dan pemeliharaan ruang publik berkualitas menghadapi tantangan tersendiri. Sulyk (2023) menunjukkan bahwa absennya ruang publik yang berfungsi baik mengurangi peluang kontak sosial dan memperlemah kohesi komunitas, karena warga kehilangan arena untuk bertemu, berbagi, dan mempertegas kebersamaan. Kondisi ini sangat relevan bagi kota-kota kepulauan kecil yang karakteristik keterbatasan sumber dayanya kerap membuat ruang publik yang ada mengalami penurunan kualitas fisik tanpa penanganan yang memadai.

Ruang publik *waterfront* memiliki posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi dan interaksi sosial, tetapi juga menghubungkan kehidupan kota dengan laut dan mengartikulasikan identitas maritim komunitas (Timur, 2013). *Waterfront* menjadi "wajah" kota berbasis air yang secara langsung merefleksikan kualitas tata ruang publik dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang terbuka yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warganya.

Simeulue adalah kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh yang terletak di Samudra Hindia. Kota Sinabang sebagai ibu kota Kabupaten Simeulue merupakan kota kepulauan kecil dengan akses terbatas ke kota-kota besar, sehingga ruang publik yang ada di dalam kota menjadi satu-satunya arena sosial yang dapat dijangkau oleh sebagian besar warganya. Keterbatasan pilihan ruang rekreasi dan

sosial menjadikan kualitas ruang publik yang ada bernilai strategis tinggi bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Sinabang sehari-hari.

Salah satu elemen paling menonjol dan berpotensi menjadi penguat identitas ruang publik pesisir Sinabang adalah Tugu Lobster sebagai *landmark* kota. Tugu Lobster tidak sekadar berfungsi sebagai monumen visual, tetapi berpotensi menjadi titik orientasi dan simbol kebanggaan yang mengikat warga pada identitas kota berbasis laut. Taman Kota Tugu Lobster sebagai ruang publik *waterfront* yang mengelilingi *landmark* ini menjadi satu-satunya ruang publik pesisir beridentitas kuat di Sinabang.

Dalam perspektif citra kota, Lynch (1960) menekankan bahwa *imageability* yang tinggi memudahkan manusia membaca, mengingat, dan menavigasi kota secara intuitif, dan bahwa citra kota dibentuk oleh lima elemen fisik: jalur (*paths*), tepian (*edges*), kawasan (*districts*), simpul (*nodes*), dan tengara (*landmarks*). Tugu Lobster sebagai *landmark* menggenapi fungsi tengaran yang mengikat memori kolektif warga pada "wajah" pesisir kota, sehingga kualitas ruang publik yang mengelilinginya turut menentukan kekuatan dan makna *landmark* tersebut di benak komunitas.

Ketika *landmark* hanya hadir sebagai objek visual tanpa kualitas ruang yang memadai di sekitarnya, fungsi sosial ruang publik melemah. Sulyk (2023) menegaskan bahwa absennya ruang publik yang berfungsi mengurangi peluang kontak sosial yang pada gilirannya memperlemah kohesi komunitas, sehingga penurunan kualitas fisik ruang publik tidak hanya berdampak estetis melainkan berdampak sosial yang nyata. Argumentasi ini memberikan justifikasi kuat mengapa evaluasi kualitas Taman Kota Tugu Lobster tidak dapat ditunda dan perlu dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti.

Standar konseptual untuk menilai kualitas ruang publik secara komprehensif dirumuskan oleh Carr *et al.* (1992) melalui tiga kriteria: *responsive* (responsif terhadap kebutuhan beragam pengguna), *democratic* (dapat diakses oleh semua kalangan), dan *meaningful* (bermakna bagi komunitas). Ketiga kriteria ini menjadi acuan normatif yang melampaui sekadar kelengkapan fasilitas fisik, namun juga harus berupa sebuah ruang publik yang mampu menyesuaikan diri dengan

kebutuhan penggunaannya, terbuka bagi semua, dan menyimpan makna kolektif yang menjadikannya berharga di mata setiap penggunaannya.

Pendekatan *placemaking* dari *Project for Public Spaces* (PPS, 2009) menawarkan kerangka evaluatif untuk menilai kualitas ruang publik. PPS merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1975 oleh Fred Kent, dengan mengembangkan lebih lanjut metode riset observasional William H. Whyte dalam "*Street Life Project*" yang mengamati secara sistematis perilaku pengguna ruang publik di New York, sebagaimana didokumentasikan dalam karya Whyte "*The Social Life of Small Urban Spaces*" (1980). Berangkat dari fondasi observasional tersebut, PPS mengembangkan pendekatan *placemaking* yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan aktivitas nyata pengguna ruang sebagai dasar perancangan dan evaluasi ruang publik, salah satunya melalui *place diagram* yang merupakan sebuah instrumen dalam mengorganisasi penilaian ke dalam empat dimensi yang saling terkait: aksesibilitas dan keterhubungan, kenyamanan dan citra, ragam aktivitas, serta sosiabilitas. Dalam penelitian ini, "kualitas ruang publik" dioperasionalkan melalui keempat dimensi *place diagram* tersebut, sehingga setiap klaim evaluatif dapat ditelusuri ke indikator fisik yang spesifik, terukur, dan dapat diverifikasi melalui penilaian lapangan.

Kelayakan penggunaan *place diagram* sebagai instrumen evaluasi ruang publik telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian terdahulu pada konteks *waterfront* yang beragam. Malkoç *et al.* (2017) menerapkan kerangka ini untuk menganalisis ruang publik di Bornova, Turki, dan menunjukkan bahwa penilaian berbasis empat dimensi PPS dapat dikaitkan secara langsung dengan perumusan strategi pengembangan ruang. Pada konteks *waterfront*, Ferah *et al.* (2023) menggunakan *place diagram* untuk mengevaluasi kualitas spasial Sarayburnu di Istanbul dan berhasil mengidentifikasi persoalan konektivitas air-darat serta kenyamanan penggunaan ruang secara terukur, sementara Boudjellal *et al.* (2022) membuktikan bahwa dimensi akses dan keterhubungan dalam kerangka PPS berperan sebagai pengungkit utama bagi kualitas dimensi lainnya dalam proyek rehabilitasi lingkungan di Batna, Aljazair. Di ranah domestik, Firmansyah *et al.* (2021) mengaplikasikan keempat variabel *placemaking* untuk menilai Pantai Palippis di

Sulawesi Barat, sedangkan Fachrurrazi *et al.* (2025) mengevaluasi ruang publik di Kota Sabang, Aceh, konteks kepulauan yang relatif dekat secara geografis dan kultural dengan Simeulue. Konsistensi penggunaan *place diagram* pada berbagai skala kota dan karakteristik ruang publik pesisir tersebut menegaskan bahwa instrumen ini bersifat adaptif, aplikatif, dan sah untuk digunakan dalam mengevaluasi kondisi eksisting Taman Kota Tugu Lobster sebagai ruang publik *waterfront* di Sinabang.

Di luar persoalan fisik dan identitas *landmark*, konteks lokal Simeulue menghadirkan potensi luar biasa melalui tradisi Nandong yang merupakan tradisi lisan paling populer dan ikonik budaya Simeulue dengan bentuk performatif dan komunal (Ismail *et al.*, 2020). Nandong menyediakan peluang untuk memperkaya *programming* aktivitas di ruang publik *waterfront*, karena sifat performatifnya yang melibatkan kebersamaan dapat membangun sosiabilitas, menarik partisipasi berbagai kelompok warga, dan menghidupkan ruang publik sebagai arena budaya yang bermakna di luar fungsi rekreasi semata.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini diposisikan sebagai kajian evaluatif-preskriptif yang bertolak dari evaluasi sistematis kondisi eksisting Taman Kota Tugu Lobster menggunakan *place diagram*, kemudian merumuskan strategi perbaikan berbasis temuan evaluasi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak bersifat generik, melainkan terkalibrasi secara kontekstual pada karakter *waterfront*, identitas *landmark* Tugu Lobster, dan potensi budaya Nandong sebagai sumber *programming* yang memberi makna kolektif pada ruang publik pesisir Sinabang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus penelitian diarahkan pada dua pertanyaan utama:

- 1) Bagaimana kualitas ruang publik di Taman Kota Tugu Lobster kawasan pesisir Sinabang, berdasarkan indikator *placemaking* yang mencakup aksesibilitas dan keterhubungan, kenyamanan dan citra, ragam aktivitas, serta sosiabilitas?

- 2) Bagaimana integrasi *placemaking* dapat dirumuskan untuk meningkatkan kualitas ruang publik pesisir Taman Kota Tugu Lobster?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengevaluasi kualitas ruang publik Taman Kota Tugu Lobster sebagai kapasitas fisik ruang dalam mendukung keempat dimensi *place diagram* sehingga menghasilkan penilaian berbasis data terhadap kondisi eksisting ruang publik pesisir Sinabang.
- 2) Merumuskan strategi *placemaking* yang mengintegrasikan intervensi fisik, programming aktivitas berbasis potensi Nandong, dan tata kelola ruang untuk meningkatkan kualitas ruang publik pesisir Taman Kota Tugu Lobster, dengan temuan penilaian fisik sebagai landasan empirisnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dan instansi terkait, penelitian ini menghasilkan penilaian berbasis data terhadap kondisi eksisting Taman Kota Tugu Lobster dan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengelolaan ruang publik *waterfront* Sinabang. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan contoh pengoperasionalan *place diagram* sebagai kerangka evaluatif-preskriptif pada konteks kota kepulauan kecil yang masih jarang dijumpai dalam literatur *placemaking* berbahasa Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi secara spasial pada Taman Kota Tugu Lobster beserta area *waterfront* yang langsung berbatasan dengannya di Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Ruang lingkup kajian mencakup zona ruang terbuka publik, jalur pedestrian tepi air, dan elemen-elemen fisik ruang publik yang secara langsung membentuk pengalaman keruangan di kawasan tersebut. Secara metodologis, pengumpulan data primer dipusatkan pada penilaian fisik berbasis

lembar *checklist place diagram* dan dokumentasi visual sistematis, tanpa instrumen berbasis responden manusia.

1.6 Justifikasi Pemilihan Lokus

Pemilihan Taman Kota Tugu Lobster sebagai lokus penelitian didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, Taman Kota Tugu Lobster adalah satu-satunya ruang publik *waterfront* yang memiliki identitas *landmark* kuat di Kota Sinabang, sehingga ia menjadi titik konsentrasi aktivitas sosial dan rekreasi terpenting bagi warga kota. Kedua, sebagai ruang publik *waterfront* berbasis *landmark*, Taman Kota Tugu Lobster merepresentasikan potensi sekaligus tantangan *placemaking* di konteks kota kepulauan kecil secara paling lengkap. Taman ini memiliki nilai *imageability* dan identitas kota, tetapi diduga mengalami penurunan kualitas fisik yang belum pernah dievaluasi secara sistematis. Ketiga, lokus ini relevan untuk menguji replikabilitas *place diagram* sebagai kerangka evaluatif-preskriptif pada konteks *waterfront* kota kepulauan kecil, sejalan dengan tujuan kontribusi keilmuan penelitian ini. Lokus lain di Sinabang tidak memiliki kombinasi karakter *waterfront*, *landmark*, dan relevansi perencanaan yang setara, sehingga Taman Kota Tugu Lobster merupakan pilihan yang paling *justified* secara teoritis maupun praktis.

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan uraian dari sistematika pembahasan dalam penyusunan penulisan:

1) Bab I: Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, serta kerangka berpikir.

2) Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan landasan teori ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian serta acuan-acuan lainnya yang akan mendukung penelitian.

3) Bab III: Metode Penelitian

Menjelaskan lokasi dari penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian apa yang akan digunakan, sumber data yang menjadi landasan, serta bagaimana teknik pengambilan data dan menganalisanya.

4) Bab IV: Hasil dan Pembahasan

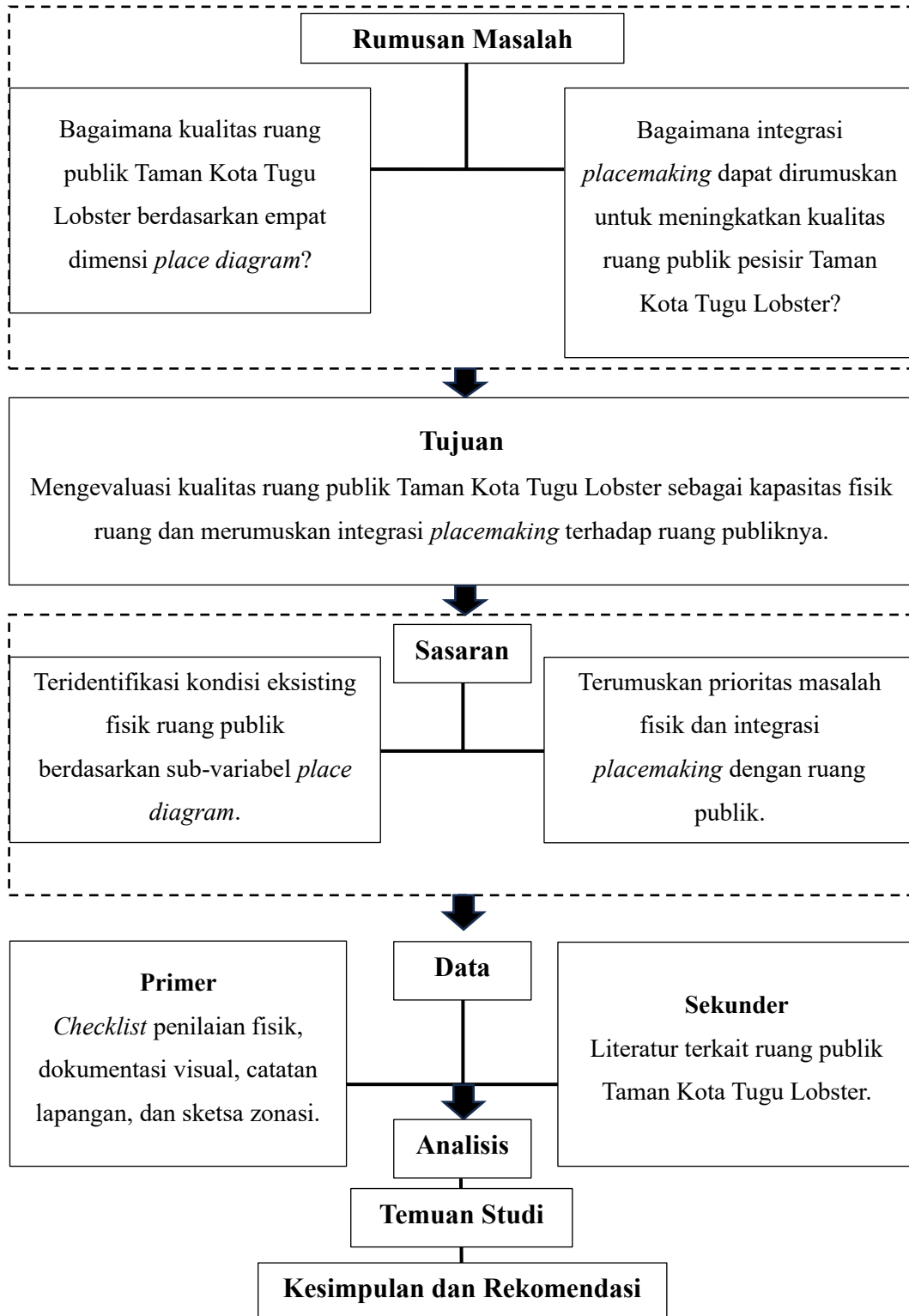
Menguraikan mengenai objek penelitian, analisa data, temuan dan pembahasan penelitian, serta hasil dari temuan penelitian.

5) Bab V: Penutup

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran, serta masukan mengenai penelitian.

1.8 Kerangka Alur Pikir Penelitian

Adapun kerangka alur pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Alur Pikir Penelitian (Penulis, 2026)